



Rencana Kerja (RENJA) Perangbat Daerah Tahun 2025



Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Jl. KH. Wahid Hasyim No.143 Telp.(0321) 874549 Jombang

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-206 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 yang akan berakhir seiring dengan masa jabatan Kepala Daerah saat ini.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan acuan perencanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026. Adapun penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sebagai salah satu hasil reuiu internal, serta dokumen pendukung lainnya. Sejalan dengan reuiu internal terhadap Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Renstra, serta Isu Strategis OPD.

Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang pada tahun 2025 merupakan perencanaan jangka pendek yang melaksanakan program kerja pembangunan Sektor Perdagangan dan Sektor Perindustrian.

Dalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga telah menyusun dan menganggarkan program dan kegiatan yang berbasis Gender yang tertuang dalam pengarusamaan gender (PUG) melalui perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG).

Semoga dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan acuan dalam perencanaan kedepan sehingga dapat mendukung keberhasilan kegiatan pembangunan dibidang perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Jombang serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Jombang, 12 Juli 2024
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN JOMBANG



Drs. SUWIGNYO. M.M.
Pembina Utama Muda
NIP.196601161992031001

Kata Pengantar | ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	42
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	46
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	63
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	65
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	67
3.3. Program dan Kegiatan	70
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	79
BAB V PENUTUP	90

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-206 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023. Serta mengacu pada Renstra Organisasi Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut sebagai RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan fungsi operasional dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang yang ditetapkan setiap tahun. RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025. Disamping itu juga menjadi pedoman penyusunan Renja RKPD Tahun 2025. RKPD Tahun 2024 menjadi dasar perumusan tujuan jenis kegiatan, kelompok sasaran, hasil, manfaat dan lokasi serta prakiraan maju berdasarkan pada prioritas, sasaran, program dan pagu indikatif yang telah ditentukan dan selanjutnya akan disusun ke dalam Renja SKPD Tahun 2025 serta memperhatikan keselarasan dan konsistensinya terhadap Renstra SKPD.

Keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat memerlukan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah memperhatikan 10 Asas Umum Penyelenggaraan Negara, sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang selaras dengan tujuan Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Sejahtera, adil dan makmur menggambarkan tentang pemerataan pembangunan diseluruh Kabupaten

Jombang. Dimana sekarang ini Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2025 yaitu **“Penguatan Daya Saing SDM dan Ekonomi Melalui Hilirisasi Agrobisnis”**. Dari sisi kemandirian dan kesejahteraan, tidak hanya bisa dilihat dari kemampuan menghidupi diri sendiri dan kemampuan batiniah dan lahiriah (ekonomi). Ini semua dikarenakan masuknya era globalisasi yang bermakna persaingan sudah tidak lagi melibatkan sumber daya internal (lokal), tetapi sudah melibatkan sumber daya eksternal.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendukung Tema Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2025 yaitu **“Hilirisasi Agrobisnis”**. Melalui kebijakan Revitalisasi Pasar, Pengembangan hasil-hasil produk unggulan daerah, dan Pengembangan Infrastruktur pendukung kawasan industri, dengan indikator sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan. Dalam rangka menganalisis perkembangan situasi dan kondisi Dinas Perdagangan dan Perindustrian beberapa tahun ke depan, maka perlu dirumuskan isu-isu strategis yang sebagaimana permasalahan berdasarkan urusan perdagangan dan urusan perindustrian. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun rencana.

Kegiatan pembangunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2025 dilaksanakan Dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang melaksanakan tema pembangunan ke-3 yaitu **“Pembangunan Ekonomi Yang Merata dan Berkelanjutan”** dalam kegiatan strategis daerah yaitu Revitalisasi/ Pembangunan Infrastruktur Ekonomi (Revitalisasi/Pembangunan Lanjutan Pasar) dan Penuntasan Penataan Junction Local Street Food/Sentra Pedagang Kaki Lima (Penataan Sentra Kuliner bagi PKL).

Guna mendukung tujuan dan sasaran RPJM periode Tahun 2024-2026 Kabupaten Jombang, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan 10 program yang terdiri atas 1 program rutin dan 9 program non rutin, 26 kegiatan yang terdiri atas 7 kegiatan rutin dan 19 kegiatan non rutin dan 46 sub kegiatan yang terdiri atas (14 sub kegiatan rutin dan 32 sub kegiatan non rutin yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 75 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang;
13. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 050/844/415.01/2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPD) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di sektor perdagangan dan Industri;
3. Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama yang sesuai dengan arah kebijakan dari kegiatan yang telah disepakati bersama di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang.

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK, SPM, SDGs, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi

maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, yakni melalui usulan pemangku kepentingan dalam usulan prioritas kecamatan dan, usulan melalui forum renja Perangkat Daerah.
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- Rencana Program dan Kegiatan Dengan Dana Indikatif
- Rencana Program dan Kegiatan Dalam Pengarustamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Disdagrin ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Disdagrin dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Disdagrin, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang pada tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Jombang dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pada tahun anggaran 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.599.419.919,00 dengan rincian belanja tidak langsung senilai Rp. 10.218.926.319,00 dan belanja langsung senilai Rp. 9.380.493.600,00 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Kegiatan anggaran tahun 2023 total anggaran Rp.33.710.510.830,00. terealisasi sebanyak Rp.25.304.324.882,00 atau tercapai sebesar 75,06%. Pada tahun anggaran 2024 didukung atas 10 program, 21 kegiatan dan 46 sub kegiatan dengan besaran anggaran 33.660.892.296,00. Sumber Dana selain dari alokasi belanja APBD juga dari anggaran DAK-Non Fisik senilai Rp.1.972.760.000,00 serta anggaran dari DBHCHT senilai Rp. 200.000.000,00.

Adapun evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan hambatan dan permasalahan yang terjadi dan kebijakan dan rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut antara lain adalah :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (capaian dibawah 50% sampai dengan triwulan II 2024), diantaranya :

a. Program perijinan dan pendaftaran perusahaan, dengan indikator Persentase penerbitan rekomendasi perijinan. Adapun kegiatannya adalah :

- Penerbitan Tanda Daftar Gudang, dengan indikator Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (8 dokumen), realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 25%. Dengan sub kegiatan :
 - Fasilitasi penerbitan Tanda Daftar Gudang, dengan indikator Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (8 dokumen), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 25% atau sebanyak 2 dokumen.
- Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, dengan indikator Jumlah rekomendasi ijin usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang diterbitkan (4 dokumen), realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 25%. Dengan sub kegiatan :
 - Fasilitasi perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik, dengan indikator Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara *Elektronik* (4 dokumen), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 25% atau sebanyak 1 dokumen.

b. Program pengembangan ekspor, dengan indikator Presentase Peningkatan ekspor pelaku usaha yang terfasilitasi. Adapun kegiatannya adalah :

- Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi dan misi dagang (410 pelaku usaha), realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 13.90%. Dengan sub kegiatan :
 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan, dengan indikator Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (12 pelaku usaha), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 16.67% atau sebanyak 2 pelaku usaha.

- c. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan kegiatan :
- Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan indikator Tingkat kepuasan kinerja personalia pengelola pasar daerah terhadap pedagang pasar (77 persen). Dengan sub kegiatan :
 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, dengan indikator Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan (12 dokumen), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 25% atau sebanyak 3 dokumen.
- d. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, dengan kegiatan :
- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah hasil monitoring ketersediaan bapokting yang ditindaklanjuti (12 laporan), realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 41.67%, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, dengan indikator Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (12 laporan), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 41.67% atau sebanyak 5 laporan.
 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat, dengan indikator Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (12 laporan), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 41.67% atau sebanyak 5 laporan.
 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah komoditas bapokting yang terkendali (3 data). Dengan sub kegiatan :
 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan, dengan indikator Jumlah Laporan

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (13 laporan), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 38.46% atau sebanyak 5 laporan.

- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (8 laporan), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 37.50% atau sebanyak 3 laporan.
- Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah laporan hasil evaluasi pengawasan, penyaluran yang ditindaklanjuti (12 laporan), realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 41.67%. dengan sub kegiatan :
 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi, dengan indikator Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (12 laporan), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 41.67% atau sebanyak 5 laporan.
- e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan indikator Persentase alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sesuai standar. Adapun kegiatannya adalah :
 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan indikator Tingkat kepuasan pengguna layanan kemetrologian (77 persen), realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 34.53%. Dengan sub kegiatan :
 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dengan indikator Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (3.000 unit), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 34.53% atau sebanyak 1.036 unit.
- f. Program pengendalian izin usaha industri, dengan indikator Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah. Adapun kegiatannya adalah :
 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan

Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan (1 dokumen), realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 37.50%. Dengan sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota (1 dokumen), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 37.50% atau sebanyak 2 laporan.
 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA), dengan indikator Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi (1 dokumen), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 37.50% atau sebanyak 2 laporan.
- g. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan indikator Persentase pengawasan industri dalam SIINas. Adapun kegiatannya adalah :
- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah dokumen informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten (1 dokumen), realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 43.75%. Dengan sub kegiatan :

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (1 dokumen), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 43.75% atau sebanyak 2 laporan.
 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas, dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (1 dokumen), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 43.75% atau sebanyak 2 laporan
- h. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur. Adapun kegiatannya adalah :
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator Jumlah pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu. Dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (17 laporan), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 41,18% atau sebanyak 7 laporan.
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator Jumlah pemenuhan penunjang kantor urusan pemerintah daerah (12 laporan). Dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan (12 laporan), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 41.67% atau sebanyak 5 laporan.
 - tercapai 41,18% atau sebanyak 7 laporan.

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik (129 unit). Dengan sub kegiatan:
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (40 unit), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 25% atau sebanyak 10 unit.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (capaian 50% sampai dengan triwulan II 2024), diantaranya :

- a. Program perijinan dan pendaftaran perusahaan, dengan indikator Persentase penerbitan rekomendasi perijinan. Adapun kegiatannya adalah :
 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, dengan indikator Jumlah ijin usaha perdagangan yang diterbitkan (4 dokumen), realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 50%. Dengan sub kegiatan :
 - Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi secara elektronik, dengan indikator Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (4 dokumen), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 50% atau sebanyak 2 dokumen.
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan indikator Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah, dengan kegiatan :
 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan indikator Tingkat kepuasan kinerja personalia pengelola pasar daerah terhadap pedagang pasar (77 persen). Dengan sub kegiatan :
 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana

Distribusi Perdagangan (2 dokumen), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 50% atau sebanyak 1 dokumen.

- Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan indikator Tingkat kepuasan kinerja personalia pengelola pasar daerah terhadap pedagang pasar (77 persen). Dengan sub kegiatan :
 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (2 dokumen), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 50% atau sebanyak 1 dokumen.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Persentase rata- rata capaian kinerja aparatur, dengan kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan (8 dokumen). Dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (3 dokumen).
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (5 dokumen)

2.1.3 Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan (capaian diatas 50% sampai dengan triwulan II 2024), diantaranya :

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan indikator Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah, dengan kegiatan :
- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan indikator Jumlah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dicukupi (16 pasar daerah). Dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan indikator Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (18 unit), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 100% sebagaimana besaran target.
 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan indikator Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (16 unit), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 100% sebagaimana besaran target.
- b. Program pengembangan ekspor, dengan indikator Presentase Peningkatan ekspor pelaku usaha yang terfasilitasi. Adapun kegiatannya adalah :
- Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi dan misi dagang (410 pelaku usaha), realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 13.90%. Dengan sub kegiatan :
 - Pameran Dagang Nasional, dengan indikator Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (8 pelaku usaha), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 112.50% atau sebanyak 9 pelaku usaha.
 - Pameran Dagang Lokal, dengan indikator Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (100 pelaku usaha), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 100% sebagaimana besaran target.
- c. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Adapun kegiatannya adalah :
- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan indikator Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi perdagangan (50 UMKM), realisasi sampai dengan triwulan II sebanyak 100%. Dengan sub kegiatan :
 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (50 UMKM), realisasi sampai dengan triwulan II tercapai 100% sebagaimana besaran target.

- 2.1.4 Faktor–faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya:
- Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha/UKM mengenai pentingnya pengetahuan tentang barang dalam keadaan terbungkus;
 - Masih rendahnya kesadaran yang dimiliki IKM untuk mendapatkan SNI dan ISO sebagai salah satu faktor dalam peningkatan daya saing industri;
 - Adanya kegiatan tidak dapat dilaksanakan langsung oleh OPD, karena merupakan kewenangan Propinsi;
 - Adanya kegiatan yang mana jumlah peserta pelaku usaha yang mengikuti kegiatan sangat mengapresiasi kegiatan sehingga melebihi jumlah yang ditentukan;
- 2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian, diantaranya :
- Diperlukan aplikasi untuk memudahkan pendataan secara holistik;
 - Pemerintah Pusat/Kementerian memfasilitasi melalui dana Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik);
 - Pelaksanaan Operasi pasar murah bapokting baik supporting penanganan inflasi daerah juga pelaksanaan secara mandiri;
 - Pemerintah pusat/propinsi memfasilitasi dalam bentuk penerapan teknologi;
 - Potensi Sumber Daya Alam yang memadai;
 - Beberapa kabupaten/kota bekerjasama dengan instansi pusat dan/atau provinsi melakukan link and match dengan investor;
 - Pemerintah Pusat/Kementerian sudah memfasilitasi untuk pembentukan kawasan industri.
- 2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor – faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:
- Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha dalam urusan perdagangan dan urusan perindustrian berdasarkan jenis usaha komoditi unggulan Kabupaten Jombang;

- Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pelaku usaha terkait dengan perencanaan kegiatan dan penganggarnya;
- Meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan secara matang dan terpadu

Adapun hasil rekapitulasi evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sebagaimana pada [Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.](#) sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)								Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Tingkat Realisasi (%) (2023)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9=(8/7)		10		11=(6+8+10)		12=(11/5)	
URUSAN PLIHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
3.30.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase rata- rata capaian kinerja aparatur	Persen	100	200	100	10,938,514,410	100	9,188,641,855	100.00	84.00	100	10,219,182,694	400.00	19,407,824,549	400.00	189.92
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Dokumen	24	N/A	N/A	16,727,581	N/A	16,523,426	N/A	98.78	8	15,391,852	8.00	31,915,278	100.00	207.35
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Dokumen	N/A	200	100	N/A	100	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	300.00	N/A	N/A	N/A
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	N/A	3	6,516,531	3	6,516,200	100.00	99.99	3	7,650,300	6.00	14,166,500	200.00	185.18
		Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	Dokumen	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.00	N/A	N/A	N/A
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	N/A	5	10,211,050	5	10,007,226	100.00	98.00	5	7,741,552	10.00	17,748,778	200.00	229.27
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Laporan	N/A	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Tahun 2025

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Tingkat Realisasi (%) (2023)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9=(8/7)		10		11=(6+8+10)		12=(11/5)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 bulan	12	N/A	N/A	9,002,566,929	N/A	7,321,289,120	N/A	81.32	12	7,926,295,782	12.00	15,247,584,902	100.00	192.37
		Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Persen	N/A	200	100	N/A	100	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	300.00	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	198	N/A	57	8,691,129,679	57	7,011,501,870	100.00	80.67	58	7,598,725,632	115.00	14,610,227,502	198.28	192.27
		Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang difasilitasi	12 Dokumen	N/A	28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28.00	N/A	N/A	N/A
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	36	N/A	12	309,937,500	12	308,287,500	100.00	99.47	12	323,418,000	24.00	631,705,500	200.00	195.32
		Jumlah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan serta Tim Pemeriksa Barang dan Jasa yang terbayar	12 bulan	N/A	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24.00	N/A	N/A	N/A
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3	N/A	1	999,950	1	999,950	100.00	100.00	1	2,191,550	2.00	3,191,500	200.00	145.63
		Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.00	N/A	N/A	N/A
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	51	N/A	17	499,800	17	499,800	100.00	100.00	17	1,960,600	34.00	2,460,400	200.00	125.49
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	N/A	N/A	993,800	N/A	240,000	N/A	24.15	12	10,000,000	12.00	10,240,000	100.00	102.40
		Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persen	N/A	N/A	100	N/A	100	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Tahun 2025

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Tingkat Realisasi (%) (2023)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9=(8/7)		10		11=(6+8+10)		12=(11/5)	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	N/A	1	993,800	1	240,000	100.00	24.15	4	10,000,000	5.00	10,240,000	125.00	102.40
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	34,800,000	12.00	34,800,000	100.00	100.00
		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	699	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	58	34,800,000	58.00	34,800,000	100.00	100.00
		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi pemberantasan cukai ilegal	Orang	N/A	400	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	400.00	N/A	N/A	N/A
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Bulan	36	N/A	N/A	824,790,700	N/A	787,498,931	N/A	95.48	12	662,497,860	12.00	1,449,996,791	100.00	218.87
		Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	N/A	200	100	N/A	100	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	300.00	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	81	N/A	26	47,633,700	26	47,029,500	100.00	98.73	25	29,100,300	51.00	76,129,800	204.00	261.61
		Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	Paket	N/A	1054	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,054.00	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	192	N/A	61	65,758,000	61	65,743,300	100.00	99.98	61	44,224,600	122.00	109,967,900	200.00	248.66

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)								Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Tingkat Realisasi (%) (2023)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9=(8/7)		10		11=(6+8+10)		12=(11/5)	
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	Paket	N/A	4750	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,750.00	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah peralatan rumah tangga perangkat daerah yang terfasilitasi	Paket	N/A	64	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	64.00	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	N/A	5	228,566,650	5	193,616,900	100.00	84.71	6	216,166,360	11.00	409,783,260	183.33	189.57
		Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terfasilitasi	Paket	N/A	1,201	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,201	N/A	N/A	N/A
		Jumlah bahan bakar minyak yang terfasilitasi	Paket	N/A	29,318	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29,318	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	51	N/A	17	273,390,950	17	273,248,180	100.00	99.95	13	219,410,800	30.00	492,658,980	230.77	224.54
		Jumlah pemenuhan barang cetak	Paket	N/A	110,397	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	110,397	N/A	N/A	N/A
		Jumlah pemenuhan barang penggandaan	Paket	N/A	100,427	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,427	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	N/A	2	115,128,000	2	114,134,000	100.00	99.14	2	76,556,000	4.00	190,690,000	200.00	249.09
		Jumlah pemenuhan bahan bacaan	Paket	N/A	102	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	102.00	N/A	N/A	N/A
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	75	N/A	47	94,313,400	47	93,727,051	100.00	99.38	14	77,039,800	61.00	170,766,851	435.71	221.66
		Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	N/A	40	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40.00	N/A	N/A	N/A
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
		Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Persen	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Tingkat Realisasi (%) (2023)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9=(8/7)		10		11=(6+8+10)		12=(11/5)	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang dibeli	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah pengadaan sarpras gedung kantor	Unit	N/A	9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.00	N/A	N/A	N/A
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarpras pendukung gedung kantor (papan sentra IKM)	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan penunjang kantor urusan pemerintah daerah	Bulan	36	N/A	N/A	731,430,400	N/A	708,216,727	N/A	96.83	12	1,186,567,200	12.00	1,894,783,927	100.00	159.69
		Persentase pemenuhan penunjang kantor urusan pemerintah daerah	Persen	N/A	200	100	N/A	100	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	300.00	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	36	N/A	3	304,000,000	3	291,550,687	100.00	95.90	12	389,400,000	15.00	680,950,687	125.00	174.87
		Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	N/A	N/A	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24.00	N/A	N/A	N/A
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat standar ukur yang terkalibrasi	Laporan	N/A	420	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	420.00	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Tingkat Realisasi (%) (2023)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9=(8/7)		10		11=(6+8+10)		12=(11/5)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Unit	36	N/A	2	427,430,400	2	416,666,040	100.00	97.48	12	797,167,200	14.00	1,213,833,240	116.67	152.27
		Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	Unit	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.00	N/A	N/A	N/A
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik	Unit	129	N/A	N/A	362,005,000	N/A	354,873,651	N/A	98.03	129	383,630,000	129.00	738,503,651	100.00	192.50
		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	Persen	N/A	160	80	N/A	80	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	240.00	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	N/A	1	38,610,000	1	38,364,545	100.00	99.36	1	38,610,000	2.00	76,974,545	200.00	199.36
		Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya	Unit	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.00	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	39	N/A	39	215,345,000	39	208,564,106	100.00	96.85	23	217,780,000	62.00	426,344,106	269.57	195.77
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	N/A	92	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	92.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	Unit	N/A	76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76.00	N/A	N/A	N/A
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel kantor	Unit	N/A	53	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	53.00	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Tingkat Realisasi (%) (2023)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9=(8/7)		10		11=(6+8+10)		12=(11/5)	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	N/A	1	50,300,000	1	50,250,000	100.00	99.90		N/A	1.00	50,250,000	N/A	N/A
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya perangkat daerah yang dipelihara	Unit	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.00	N/A	N/A	N/A
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	90	N/A	90	57,750,000	90	57,695,000	100.00	99.90	40	127,240,000	130.00	184,935,000	325.00	145.34
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	Unit	N/A	155	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	155.00	N/A	N/A	N/A
3.30.2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase penerbitan rekomendasi perijinan	Persen	100	200	100	14,635,200	100	14,175,200	100.00	96.86	100	11,072,500	400.00	25,247,700	400.00	228.02
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah ijin usaha perdagangan yang diterbitkan	Dokumen	18	N/A	N/A	5,715,600	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4,185,000	4.00	4,185,000	100.00	100.00
		Jumlah rekomendasi ijin usaha toko swalayan (IUTS) yang diterbitkan	RIU	N/A	27	6	N/A	6	5,455,600	100.00	N/A	N/A	N/A	33.00	5,455,600	N/A	N/A
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	18	N/A	6	5,715,600	6	5,455,600	100.00	95.45	4	4,185,000	10.00	9,640,600	250.00	230.36
		Jumlah berkas ijin usaha (IUTS) yang diverifikasi	RIU	N/A	27		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah survey lokasi ijin usaha	Kali	N/A	27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27.00	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)								Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Tingkat Realisasi (%) (2023)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9=(8/7)		10		11=(6+8+10)		12=(11/5)	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	30			4,119,800		3,919,800		95.15	10	3,165,000	10.00	7,084,800	100.00	223.85
		Jumlah rekomendasi ijin usaha Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan	RIU	N/A	35	8	N/A	8	3,919,800	100.00	N/A	N/A	N/A	43.00	3,919,800	N/A	N/A
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	30		8	4,119,800	8	3,919,800	100.00	95.15	8	3,165,000	16.00	7,084,800	200.00	223.85
		Jumlah berkas ijin usaha (TDG) yang diverifikasi	RIU	N/A	35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah survey lokasi ijin usaha	N/A	N/A	35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35.00	N/A	N/A	N/A
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah rekomendasi ijin usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang diterbitkan	Dokumen	12	N/A	N/A	4,799,800	N/A	4,799,800	N/A	100.00	6	3,722,500	6.00	8,522,300	100.00	228.94
		Jumlah dokumen rekomendasi ijin usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang diterbitkan	RIU	N/A	15	6	N/A	6	4,799,800	100.00	N/A	N/A	N/A	21.00	4,799,800	N/A	N/A
	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/ atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	12	N/A	6	4,799,800	6	4,799,800	100.00	100.00	4	3,722,500	10.00	8,522,300	250.00	228.94
		Jumlah berkas ijin usaha (STPW) yang diverifikasi	RIU	N/A	11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah survey lokasi ijin usaha	Kali	N/A	11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.00	N/A	N/A	N/A
3.30.3	PROGRAMPENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	Persen	100	225.38	122.72	18,960,770,924	122.72	12,348,278,826	100.00	65.13	100	8,558,935,322	448.10	20,907,214,148	448.10	244.27
		Tingkat kepuasan kinerja personalia pengelola pasar daerah terhadap pedagang pasar	Persen	N/A	77	77	N/A	77	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	154.00	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)								Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Tingkat Realisasi (%) (2023)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9=(8/7)		10		11=(6+8+10)		12=(11/5)	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dicukupi	Unit	16	N/A	N/A	18,845,623,123	N/A	12,241,836,654	N/A	64.96	16	8,463,575,320	16.00	20,705,411,974	100.00	244.64
		Jumlah penyediaan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dicukupi	Unit	N/A	32	18	N/A	18	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	50.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah PAD Retribusi	Rp.	N/A	9,233,505,094	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9,233,505,094	N/A	N/A	N/A
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	18	N/A	18	16,114,825,935	18	9,643,293,965	100.00	59.84	18	5,524,090,150	36.00	15,167,384,115	200.00	274.57
		Jumlah pasar daerah yang direvitalisasi	Pasar daerah	N/A	19	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah laporan hasil koordinasi lintas sektoral dan stakeholder	Laporan	N/A	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah prasarana distribusi perdagangan yang tercukupi	unit	N/A	402	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	402.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah peserta sosialisasi pasar yang akan direvitalisasi	Orang	N/A	756	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	756.00	N/A	N/A	N/A
		Pengadaan lahan relokasi untuk prasarana pelaku usaha informal	Unit	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.00	N/A	N/A	N/A
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar daerah	16	N/A	16	2,730,797,188	16	2,598,542,689	100.00	95.16	16	2,939,485,170	32.00	5,538,027,859	200.00	188.40
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Laporan	N/A	28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28.00	N/A	N/A	N/A
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Tingkat kepuasan kinerja personalia pengelola pasar daerah terhadap pedagang pasar	Persen	77	77	77	115,147,801	77	106,442,172	100.00	92.44	77	95,360,002	231.00	201,802,174	300.00	211.62
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	36	N/A	4	115,147,801	4	106,442,172	100.00	92.44	12	59,868,502	16.00	166,310,674	133.33	277.79

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Tingkat Realisasi (%) (2023)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9=(8/7)		10		11=(6+8+10)		12=(11/5)	
		Jumlah peserta pelatihan pengelola sarana distribusi perdagangan	Orang	N/A	3.738	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,738	N/A	N/A	N/A
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan retribusi pasar daerah	Laporan	N/A	124	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	124.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah dokumen kerjasama mitra strategis untuk pasar daerah	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah laporan koordinasi lintas sektoral dan stakeholder	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah pelaku usaha pasar daerah yang menerima bantuan sosial	Orang	N/A	3808	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,808	N/A	N/A	N/A
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	35,491,500	2.00	35,491,500	100.00	100.00
		Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Dokumen	N/A	34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	34.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah perlengkapan kebersihan pasar yang Tercukupi	Dokumen	N/A	9,101	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9,101	N/A	N/A	N/A
		Jumlah laporan koordinasi lintas sektoral dan stakeholder	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
3.30.4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	Persen	14.29	28.58	14.29	104,487,750	14.29	91,870,800	100.00	87.92	14.29	2,067,665,700	57.16	2,159,536,500	400.00	104.44
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah hasil monitoring ketersediaan bapokting yang ditindaklanjuti	Laporan	36	N/A	N/A	16,440,300	N/A	9,285,350	#DIV/0!	56.48	12	6,926,500	12.00	16,211,850	100.00	234.06
		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi monitoring yang ditindaklanjuti	Laporan	N/A	24	14	N/A	14	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	38.00	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Tingkat Realisasi (%) (2023)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9=(8/7)		10		11=(6+8+10)		12=(11/5)	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	36	N/A	2	10,554,950	2	4,700,000	100.00	44.53	12	4,158,000	14.00	8,858,000	116.67	213.04
		Jumlah peserta sosialisasi Permendag	Orang	N/A	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Laporan	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah peserta rapat koordinasi dan sinkronisasi barang kebutuhan pokok dan barang penting	Laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	36	N/A	12	5,885,350	12	4,585,350	100.00	77.91	12	2,768,500	24.00	7,353,850	200.00	265.63
		Jumlah laporan monitoring ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Laporan	N/A	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24.00	N/A	N/A	N/A
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas bapokting yang terkendali	Komoditas	9	N/A	N/A	62,776,550	N/A	58,664,550	N/A	93.45	3	2,034,468,300	3.00	2,093,132,850	100.00	102.88
		Jumlah komoditas bahan pokok dan barang penting yang diterkendali harga dan stoknya	Komoditas	N/A	6	3	N/A	3	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	9.00	N/A	N/A	N/A

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Tahun 2025

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Tingkat Realisasi (%) (2023)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9=(8/7)		10		11=(6+8+10)		12=(11/5)	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	39	N/A	12	55,859,600	12	51,747,600	100.00	92.64	13	31,384,700	25.00	83,132,300	192.31	264.88
		Jumlah data harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilaporkan dalam sistem informasi perdagangan	Laporan	N/A	26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26.00	N/A	N/A	N/A
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	24	N/A	2	6,916,950	2	6,916,950	100.00	100.00	8	2,003,083,600	10.00	2,010,000,550	125.00	100.35
		Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan	Laporan	N/A	8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.00	N/A	N/A	N/A
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pengawasan, penyaluran yang ditindaklanjuti	Laporan	36	24	12	25,270,900	12	23,920,900	100.00	94.66	12	26,270,900	48.00	50,191,800	400.00	191.05
	Sub Kegiatan Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah rapat koordinasi pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Laporan	N/A	275	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	275.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah laporan evaluasi pengawasan pengadaan pupuk bersubsidi	Laporan	N/A	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24.00	N/A	N/A	N/A
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	36	N/A	12	25,270,900	12	23,920,900	100.00	94.66	12	26,270,900	24.00	50,191,800	200.00	191.05
		Jumlah laporan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi	Laporan	N/A	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24.00	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Tingkat Realisasi (%) (2023)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9=(8/7)		10		11=(6+8+10)		12=(11/5)	
		Jumlah laporan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi	Laporan	N/A	12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.00	N/A	N/A	N/A
3.30.5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Presentase Peningkatan ekspor pelaku usaha yang terfasilitasi	Persen	100	200	100	848,927,300	100	848,436,603	100.00	99.94	100	610,354,400	400.00	1,458,791,003	400.00	239.01
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku usaha	410	N/A	N/A	848,927,300	N/A	848,436,603	N/A	99.94	410	610,354,400	410.00	1,458,791,003	100.00	239.01
		Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi pameran dagang, misi dagang dan kemitraan	Pelaku usaha	N/A	39	323	N/A	323	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	362.00	N/A	N/A	N/A
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Pelaku usaha	N/A	N/A	20	9,457,800	20	9,205,800	100.00	N/A	N/A	N/A	20.00	9,205,800	N/A	N/A
		Jumlah peserta pembinaan pengembangan ekspor impor	Pelaku usaha	N/A	60	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60.00	N/A	N/A	N/A
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku usaha	35	N/A	18	315,532,000	18	315,469,433	100.00	99.98	8	335,568,000	26.00	651,037,433	325.00	194.01
		Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	Pelaku usaha	N/A	31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31.00	N/A	N/A	N/A
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku usaha	330	N/A	285	502,549,750	285	502,378,550	100.00	99.97	100	251,804,000	385.00	754,182,550	385.00	299.51
		Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	Pelaku usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku usaha	45	N/A	4	21,387,750	4	21,382,820	100.00	99.98	12	22,982,400	16.00	44,365,220	133.33	193.04
		Jumlah pelaku usaha yang mengikuti misi dagang	Pelaku usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)								Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Tingkat Realisasi (%) (2023)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9=(8/7)		10		11=(6+8+10)		12=(11/5)	
		Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pasar lelang	Pelaku usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
3.30.6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sesuai standar	Persen	97.77	N/A	103.71	188,453,150	103.71	184,501,192	100.00	97.90	96.85	119,999,400	200.56	304,500,592	207.08	253.75
		Persentase PAD metrologi legal	Persen	N/A	N/A	112.30	N/A	112.30	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	112.30	N/A	N/A	N/A
		Persentase peningkatan PAD sektor metrologi legal	Persen	N/A	234.81	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	234.81	N/A	N/A	N/A
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Tingkat kepuasan pengguna layanan kemetrologian	Persen	77	77	77	188,453,150	77	184,501,192	100.00	97.90	77	119,999,400	231.00	304,500,592	300.00	253.75
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	12200	N/A	3500	114,987,250	3630	111,036,752	103.71	96.56	3000	89,999,450	6,630	201,036,202	221.00	223.37
		Jumlah alat UTTP yang terstandar	Unit	N/A	9,587	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9,587	N/A	N/A	N/A
		Jumlah laporan pelayanan tera	Laporan	N/A	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah laporan pelayanan tera ulang	Laporan	N/A	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah peserta sosialisasi metrologi legal	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah alat standar ukur yang terkalibrasi	Unit	N/A	300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	300.00	N/A	N/A	N/A
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	47		12	49,165,900	14	49,164,440	116.67	100.00	12	29,999,950	26.00	79,164,390	216.67	263.88
		Jumlah laporan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)	Laporan	N/A	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah laporan pengawasan alat UTTP	Laporan	N/A	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah laporan pengawasan satuan ukuran (SU)	Laporan	N/A	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah kegiatan penyuluhan kemetrologian yang dilaksanakan	Laporan	N/A	6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.00	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Tingkat Realisasi (%) (2023)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9=(8/7)		10		11=(6+8+10)		12=(11/5)	
	Penyidikan metrologi legal	Jumlah peserta sosialisasi BDKT yang dilaksanakan	Orang	N/A	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit	N/A		N/A	24,300,000	N/A	24,300,000	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	24,300,000	N/A	N/A
		Jumlah kasus yang ditangani	Kasus	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah surat penyidikan yang ditangani	Laporan	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah pembinaan peraturan penegakan peraturan metrologi legal	Laporan	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah rapat koordinasi dengan penyidik dari instansi luar	Laporan	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.00	N/A	N/A	N/A
3.30.7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi	Persen	4.5	9	4.5	813,457,900	4.5	806,160,254	100.00	99.10	4.5	64,148,000	18.00	870,308,254	400.00	1,356.72
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi perdagangan	UMKM	375	2706	8	813,457,900	8	806,160,254	100.00	99.10	50	64,148,000	2,764	870,308,254	5,528	1,356.72
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	375	N/A	1275	813,457,900	1275	806,160,254	100.00	99.10	50	64,148,000	1,325	870,308,254	2,650	1,356.72
		Jumlah peserta pembinaan pelaku usaha informal	Pelaku usaha	N/A	80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah pelaku usaha yang mengikuti promosi dikawasan agropolitan	Pelaku usaha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah peralatan pendukung sarpras kegiatan yang tercukupi	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah peserta pembinaan pelaku usaha informal	Pelaku usaha	N/A	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30.00	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Tingkat Realisasi (%) (2023)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9=(8/7)		10		11=(6+8+10)		12=(11/5)	
	Sub Kegiatan Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah pelaku usaha informal yang mendapat bantuan sosial	Pelaku usaha	N/A	2351	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,351	N/A	N/A	N/A
		Jumlah pelaku usaha yang mengikuti promosi dikawasan agropolitan	Pelaku usaha	N/A	150	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	150.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah pelaku usaha pembinaan jaringan informasi perdagangan	Pelaku usaha	N/A	125	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	125.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah peserta temu usaha	Pelaku usaha	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah peserta sosialisasi relokasi pelaku usaha informal	Pelaku usaha	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
3.31.2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Produktivitas tenaga kerja industri	Rp/org	0.8	1.5	0.8	1,796,564,746	0.8	1,777,619,402	100.00	98.95	00.8	4,026,086,000	3.10	5,803,705,402	387.50	144.15
		Prosentase produk yang sudah terstandarisasi dan HKI	Persen	N/A	140	70	N/A	70.25	N/A	100.36	N/A	N/A	N/A	210.25	N/A	N/A	N/A
		Persentase inisiasi tahapan pembentukan kawasan industri	Persen	N/A	1.1	0.6	N/A	0.6	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	1.70	N/A	N/A	N/A
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah monitoring hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kegiatan	Dokumen	12	N/A	N/A	1,796,564,746	N/A	1,777,619,402	N/A	98.95	4	4,026,086,000	4.00	5,803,705,402	100.00	144.15
		Jumlah tenaga kerja IKM yang terlatih	IKM	N/A	180	35	N/A	35	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	215.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan formal dan informal	IKM	N/A	64,351	64,351	N/A	64,351	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	128,702	N/A	N/A	N/A
		Jumlah produk yang difasilitasi standarisasi	Produk	N/A	328	97	N/A	97	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	425.00	N/A	N/A	N/A
		Tahapan pembentukan kawasan industri	Tahapan	N/A		0.6	N/A	0.6	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	0.60	N/A	N/A	N/A
		Jumlah sentra industri yang terfasilitasi revitalisasi	Sentra	N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.00	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)								Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Tingkat Realisasi (%) (2023)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9=(8/7)		10		11=(6+8+10)		12=(11/5)	
	Sub Kegiatan Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Jumlah dokumen Perencanaan Industri Kabupaten	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah dokumen pengembangan industri hijau yang tersusun	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	50,000,000	1.00	50,000,000	100.00	100.00
		Jumlah dokumen pengembangan industri hijau yang tersusun	Dokumen	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah bantuan peralatan bagi IKM		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah monitoring dan evaluasi perkembangan rencana pengembangan industri kreatifdan industri hijau yang telah disusun	Dokumen	N/A	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20.00	N/A	N/A	N/A
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	200,000,000	1.00	200,000,000	100.00	100.00
		Jumlah tenaga kerja IKM yang dilatih	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah bantuan peralatan bagi IKM	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah label produk IKM yang terfasilitasi redesign kemasan	Label	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	3	N/A	8	1,325,364,294	8	1,320,445,302	100.00	99.63	8	1,512,268,400	16.00	2,832,713,702	200.00	187.32

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)								Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Tingkat Realisasi (%) (2023)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9=(8/7)		10		11=(6+8+10)		12=(11/5)	
		Jumlah sarana industri yang difasilitasi		N/A	66	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	66.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah bantuan peralatan bagi IKM		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah IKM yang terfasilitasi pengurusan HaKI Merek		N/A	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah IKM yang terfasilitasi pengurusan HaKI Cipta		N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah produk yang terfasilitasi pengurusan Uji Nutrisi		N/A	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah IKM yang terfasilitasi sertifikasi Halal		N/A	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah produk yang terfasilitasi sertifikasi BPOM RI		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah IKM yang tersertifikasi PKP		N/A	25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25.00	N/A	N/A	N/A
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		3	N/A	1	471,200,452	1	457,174,100	100.00	97.02	1	2,263,817,600	2.00	2,720,991,700	200.00	120.19
		Jumlah IKM yang terfasilitasi pelatihan		N/A	310	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	310.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah IKM yang terfasilitasi pelatihan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah dokumen kerjasama mitra strategis untuk IKM		N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah sentra IKM yang direvitalisasi (DAK)		N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.00	N/A	N/A	N/A
3.31.3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase fasilitas legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah		80	160	80	40,309,700	80	40,252,750	100.00	99.86	80	14,000,000	320.00	54,252,750	400.00	387.52

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Tingkat Realisasi (%) (2023)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9=(8/7)		10		11=(6+8+10)		12=(11/5)	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan		3	N/A	N/A	40,309,700	N/A	40,252,750	N/A	99.86	1	14,000,000	1.00	54,252,750	100.00	387.52
		Persentase verifikasi teknis penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan		N/A	160	80	N/A	80	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	239.83	N/A	N/A	N/A
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota		3	N/A	1	3,750,000	1	3,750,000	100.00	100.00	1	7,000,000	2.00	10,750,000	200.00	153.57
		Jumlah pengawasan industri legal		N/A	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50.00	N/A	N/A	N/A
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi,		3	N/A	2	36,559,700	2	36,502,750	100.00	99.84	1	7,000,000	3.00	43,502,750	300.00	621.47

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Tingkat Realisasi (%) (2023)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9=(8/7)		10		11=(6+8+10)		12=(11/5)	
	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, IPKI kewenangan kab/kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha	Jumlah dokumen pemeriksaan legalitas ijin usaha industri		N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Workshop legalitas Usaha NIB (Nomor Induk Berusaha (TDP, NIK, API))		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
3.31.4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pengawasan industri dalam SIINas		80	160	80	4,389,750	80	4,388,000	100.00	99.96	80	30,000,000	320.00	34,388,000	400.00	114.63
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten		3	2	N/A	4,389,750	N/A	4,388,000	N/A	99.96	1	30,000,000	3.00	34,388,000	300.00	114.63
		Persentase pengawasan industri dalam SIINas		N/A	N/A	82	N/A	82	N/A	100.00	N/A	N/A	N/A	81.65	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target kinerja capaian program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)						Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2023)		Tingkat Realisasi (%) (2023)		Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2024)	
1	2	3	4	5	6	7		8		9=(8/7)		10		11=(6+8+10)		12=(11/5)	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	25,000,000	1.00	25,000,000	100.00	100.00
		Jumlah pendataan IKM yang dilakukan		N/A	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.00	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Data ke SIINas		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	N/A
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		3	N/A	1	4,389,750	1	4,388,000	100.00	99.96	1	5,000,000	2.00	9,388,000	200.00	187.76

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan perangkat daerah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra perangkat daerah dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Pada tabel T-C.30 disajikan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang berdasarkan Indikator Kinerja Utama pada Renstra perangkat daerah.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang

NO	Indikator	SPM/ SPK/ SDGs	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1) TB-2	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
1.	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur perangkat daerah	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100.00%	23.00%	100%	100%	
2.	Meningkatnya pelayanan penerbitan rekomendasi ijin usaha	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100.00%	20.00%	100%	100%	
3.	Meningkatnya PAD sektor Pasar Daerah	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	122.72%	45.01%	100%	100%	
4.	Meningkatnya kepuasan pengguna pasar terhadap pelayanan	N/A	N/A	77%	N/A	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A	
5.	Meningkatnya data tingkat pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	N/A	N/A	14.29%	14.29%	14.29%	14.29%	100.00%	97.97%	14.29%	14.29%	
6.	Meningkatnya Perlindungan dan pengamanan konsumen	N/A	N/A	96.33%	97%	100%	100%	107.66%	35.65%	100%	100%	
7.	Meningkatnya PAD sektor Kemetrologian	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A	112.30%	N/A	N/A	N/A	

NO	Indikator	SPM/ SPK/ SDGs	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1) TB-2	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
8.	Meningkatnya akses informasi dan perluasan jaringan ekspor	N/A	N/A	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	24.00%	100%	100%	
9.	Meningkatnya peluang pasar dalam negeri	N/A	N/A	4.50%	4.50%	4.52%	4.55%	100.44%	88.89%	4.58%	4.60%	
10.	Meningkatnya kualitas tenaga kerja IKM	N/A	N/A	0,8 Rp/org	0,8 Rp/org	0,84 Rp/org	0,88 Rp/org	100.00%	50.00%	0,93 Rp/org	0,97 Rp/org	
11.	Meningkatnya Legalitas Ijin Usaha Industri	N/A	N/A	80%	80%	N/A	N/A	99.79%	37.50%	N/A	N/A	
12.	Meningkatnya Data IKM yang difasilitasi dalam SIINas	N/A	N/A	80%	80%	N/A	N/A	102.06%	43.75%	N/A	N/A	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Dagrin, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan salah satu dinas teknis daerah mempunyai peran yang sangat besar sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Jombang.

Berikut ini adalah permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdapat beberapa indikator dalam melaksanakan kinerja pelayanan, diantaranya :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, antara lain :
 - Rencana Agroindustri yang didorong meliputi industri pendukung produksi pertanian, peternakan serta industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan tanpa limbah
 - Penerapan Sistem Resi Gudang merupakan bentuk upaya memfasilitasi meningkatkan kesejahteraan petani sebagai model pemasaran komoditas

pertanian, jatuhnya harga pada saat musim panen raya. Para petani tidak dapat menyimpan hasil panen lebih lama karena sudah kehabisan biaya dan tidak punya gudang yang memadai dan pasar lelang komoditas.

- Industri berupa industri penghasil peralatan pertanian diarahkan di Bandarkedungmulyo dan industri pendukung produksi pertanian dan peternakan yang menghasilkan limbah kimia diarahkan di kecamatan Ploso.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan misi yang dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

Urusan Perdagangan

<u>Permasalahan</u>	<u>Faktor Penghambat</u>	<u>Faktor Pendorong</u>
- Laporan Ekspor impor yang kurang maksimal - Pelayanan Tera / tera ulang belum maksimal - Sarana Perdagangan belum memadai - Potensi PAD belum terealisasi secara maksimal - Harga Bapokting Fluktuatif	- Kurangnya kesadaran dari importir/ eksportir untuk melaporkan usahanya - Terbatasnya SDM kemetrolgian dan sarana prasarana tera/tera ulang belum memadai - Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna pasar untuk saling menjaga sarana dan prasarana - Belum tertibnya pembayaran retribusi oleh pedagang - Rantai distribusi bapokting yang panjang	- Pemerintah Pusat/Kementerian memfasilitasi untuk peningkatan SDM melalui diklat kemetrolgian - Pemerintah Pusat/Kementerian memfasilitasi melalui dana DAK-Fisik dan DAK-Non Fisik, dan BK - Bank Daerah melakukan terobosan ERPAS (Elektronik Retribusi Pasar) - Operasi pasar murah bapokting

Urusan Perindustrian

<u>Permasalahan</u>	<u>Faktor Penghambat</u>	<u>Faktor Pendorong</u>
- Industri kecil dan menengah masih belum banyak mengakses teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk - Sektor industri masih belum mampu memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal untuk substitusi bahan baku impor (didatangkan dari daerah/negara lain). Akibatnya biaya produksi menjadi relatif lebih tinggi - Industri kecil dan menengah masih belum banyak melakukan diversifikasi produk.	- Penguasaan teknologi masih rendah - Kualitas produk industri kecil menengah belum semuanya sesuai standard mutu yang berlaku - Kurangnya inovasi industri kecil dan menengah - Masih belum terfasilitasi secara maksimal - Masih lemahnya permodalan yang dimiliki IKM serta kemauan IKM dalam mempraktekkan hasil pelatihan - Masih terkendala sarana	- Pemerintah pusat/propinsi memfasilitasi dalam bentuk penerapan teknologi - Potensi Sumber Daya Alam yang memadai - Pemerintah pusat/propinsi memfasilitasi dalam bentuk pelatihan pelatihan - Beberapa kabupaten/kota bekerjasama dengan instansi pusat dan/atau provinsi melakukan link and match dengan investor - Beberapa lembaga keuangan memfasilitasi pemodolan melalui kredit usaha

- Industri hijau belum dapat berkontribusi secara maksimal terhadap daya saing industri daerah
- Terbentuknya kawasan industri dan kawasan peruntukan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai
- Pemerintah Pusat/Kementerian sudah memfasilitasi untuk pembentukan kawasan industri

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih
- Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor
- Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri
- Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang (SRG) dan pasar lelang
- Peningkatan perlindungan konsumen
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional
- Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional
- Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
- Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri
- Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional
- Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi
- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri
- Menguatnya struktur industri

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang memiliki beberapa kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang, yang terbagi dari faktor internal dan faktor eksternal yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Berikut uraian yang telah teridentifikasi:

FAKTOR INTERNAL

Kekuatan (<i>Strength</i>) - S	Kelemahan (<i>Weakness</i>) - W
- Kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan Pelaku Usaha UKM/IKM	- Kualitas dan kuantitas SDM pengawasan dan pembinaan pelaku usaha UKM/IKM berkompetensi dibidangnya
	- Kurangnya Petugas Pengawas Kemetrolagian yang memiliki kapabilitas
- Perkembangan teknologi komunikasi dan	- Belum tersedianya data demografi tentang

informasi untuk mendukung kegiatan Perdagangan dan Perindustrian antara lain eR-Pas (elektronik retribusi pasar), Simoleg (Sistem Informasi Metrologi Legal), Saudagar (Sistem Administrasi Usaha dan Pengendalian Harga Pasar) serta SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) untuk mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah	pelaku usaha perdagangan (PKL, Pasar, UKM/IKM) di Kabupaten Jombang
- Perhatian dan dukungan Pemerintah dalam penyediaan fasilitas tempat berusaha bagi pelaku usaha, Pasar dan Sentra UKM/IKM	- Lokasi dan aksesibilitas fasilitas tempat berusaha bagi pelaku usaha (PKL, Pasar dan Sentra UKM/IKM) yang kurang strategis dan sarana prasarana pendukung yang belum optimal
- Ketersediaan Dasar Hukum, Standar Operasional Prosedur (SOP), Peraturan dan Pedoman tentang Perdagangan dan Perindustrian	- Kualitas produk IKM yang belum optimal untuk bersaing dengan produk usaha lainnya
- Koordinasi yang baik dengan instansi vertikal maupun horizontal	- Terbatasnya kewenangan Dinas terhadap indikator dan target yang berkaitan dengan tingkat ketersediaan barang pokok dan penting lainnya

FAKTOR EKSTERNAL

Peluang (*Opportunities*) - O

- Posisi Strategis Kabupaten Jombang sebagai Kabupaten Penghubung
- Pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan dan pelaku usaha industri
- Tingginya perhatian pemerintah dan animo masyarakat untuk pengembangan produktifitas usaha dan industri
- Peluang pertumbuhan pangsa pasar bagi kegiatan UKM/IKM ditingkat regional, nasional dan internasional

Ancaman (*Threats*) - T

- Dinamika perkembangan perdagangan global dan aspek legalitas yang mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum
- Sudah banyaknya berdiri yayasan lembaga perlindungan konsumen yang ada di Kabupaten Jombang;
- Meningkatnya persaingan antar para pelaku usaha baik sesama pelaku usaha mikro maupun dengan pelaku usaha kecil, menengah dan besar
- Para pelaku IKM kurang dapat atau terhambat mengimbangi kemajuan teknologi yang semakin bertambah maju di era globalisasi
- Pertumbuhan dan persebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) pada lokasi – lokasi fasilitas umum dan ruang publik
- Kurangnya kepedulian masyarakat pengguna pasar daerah mengakibatkan kurang terjaganya kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar daerah
- Beredarnya produk impor yang belum memiliki standar dan mulai berdirinya minimarket waralaba yang dimiliki perorangan/swasta

	- Adanya peningkatan penerapan NTBs (Non Tarif Barriers) di negara-negara tujuan ekspor guna melindungi produk mereka
- Kerjasama dan dukungan stakeholder eksternal kepada pelaku usaha UKM/IKM	- Sistem informasi dan fluktuasi harga barang pokok dan penting lainnya
- Kemampuan daya saing dan semangat kewirausahaan pelaku usaha UKM/IKM	- Keterbatasan akses permodalan pelaku usaha UKM/IKM
- Kemajuan teknologi internet bagi jangkauan pemasaran dan promosi perdagangan (online) seiring dengan perkembangan platform ekonomi digital yang masif	- Sinkronisasi dan Integrasi data perizinan dengan Pusat
- Pembangunan infrastruktur jalan secara pesat memiliki dampak ekonomi besar, antara lain dalam peningkatan perdagangan dan pergudangan serta peningkatan ekonomi kreatif dan pengembangan usaha UKM/IKM	- Kesadaran pelaku usaha untuk tertib serta kepatuhan terhadap peraturan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas tahun 2024, antara lain dengan :

- 1) Pembangunan dan revitalisasi pasar daerah,
- 2) Upaya pembentukan PD Pasar,
- 3) Upaya penyertaan Modal kepada BUMD,
- 4) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UM dan IKM melalui akses permodalan
- 5) Meningkatkan daya saing daerah, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan potensi unggulan daerah yang berdaya saing dengan meningkatkan jaringan distribusi produk,
- 6) Pengembangan IKM dan meningkatkan struktur industri mulai dari industri hulu dan hilir.
- 7) Masih banyak gudang industri yang belum memiliki legalias (TDG)
- 8) Mekanisme pengendalian distribusi barang stabilitas ketersediaan barang pokok dan penting
- 9) Optimalisasi pelayanan tera/tera ulang dalam rangka upaya perlindungan konsumen
- 10) Sarana prasarana kawasan industri

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam proses perencanaan awal program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2024 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan/sub kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Adapun review rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat perubahan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berdasarkan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada [Tabel 2.3 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Jombang](#). sebagai berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					19.354.419.919						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					18.563.419.919						
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase rata- rata capaian kinerja aparatur	100 Persen	10.218.926.319	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase rata- rata capaian kinerja aparatur	100 Persen	10.218.926.319	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	8 dokumen	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	8 dokumen	10.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 bulan	7.951.401.859	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 bulan	7.951.401.859	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	7.698.798.073	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	7.698.798.073	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	250.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	250.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.603.786	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.603.786	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	2.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	2.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	34.800.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	34.800.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	58 Paket	34.800.000			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	58 Paket	34.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	580.547.260	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	580.547.260	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27 Paket	29.100.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27 Paket	29.100.300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	64 Paket	44.224.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	64 Paket	44.224.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	161.666.360	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	161.666.360	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	200.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	68.556.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	68.556.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	77.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	77.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah pemenuhan penunjang kantor urusan pemerintah daerah	12 bulan	1.186.567.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah pemenuhan penunjang kantor urusan pemerintah daerah	12 bulan	1.186.567.200	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	389.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	389.400.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	797.167.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	797.167.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik	72 unit	453.610.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik	72 unit	453.610.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.610.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.610.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	200.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	125.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	125.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	90 Unit	90.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	90 Unit	90.000.000	
2.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase penerbitan rekomendasi perijinan	100 persen	100.000.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase penerbitan rekomendasi perijinan	100 persen	100.000.000	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah ijin usaha perdagangan yang diterbitkan	6 dokumen	95.000.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah ijin usaha perdagangan yang diterbitkan	6 dokumen	95.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	95.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	95.000.000	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah rekomendasi ijin usaha Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan	4 dokumen	3.000.000	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah rekomendasi ijin usaha Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan	4 dokumen	3.000.000	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	4 Dokumen	3.000.000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	4 Dokumen	3.000.000	
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah rekomendasi ijin usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang diterbitkan	4 dokumen	2.000.000	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah rekomendasi ijin usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang diterbitkan	4 dokumen	2.000.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri		Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	10 Dokumen	2.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri		Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	10 Dokumen	2.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	100 Persen	6.543.200.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	100 Persen	6.543.200.000	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dicukupi	16 pasar daerah	6.498.200.000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dicukupi	16 pasar daerah	6.498.200.000	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	18 Unit	4.290.000.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	18 Unit	4.290.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	16 Unit	2.208.200.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	16 Unit	2.208.200.000	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Tingkat kepuasan kinerja personalia pengelola pasar daerah terhadap pedagang pasar	77 Persen	45.000.000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Tingkat kepuasan kinerja personalia pengelola pasar daerah terhadap pedagang pasar	77 Persen	45.000.000	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	15.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	15.000.000	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen	30.000.000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	14,29 Persen	773.311.200	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	14,29 Persen	773.311.200	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah hasil monitoring ketersediaan bapokting yang ditindaklanjuti	12 laporan	6.926.500	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah hasil monitoring ketersediaan bapokting yang ditindaklanjuti	12 laporan	6.926.500	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	4.158.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	4.158.000	
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	2.768.500	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	2.768.500	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota		Jumlah komoditas bapokting yang terkendali	3 komoditas	746.384.700	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota		Jumlah komoditas bapokting yang terkendali	3 komoditas	746.384.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	13 Laporan	31.384.700	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	13 Laporan	31.384.700	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	8 Laporan	715.000.000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	8 Laporan	715.000.000	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil evaluasi pengawasan, penyaluran yang ditindaklanjuti	12 laporan	20.000.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil evaluasi pengawasan, penyaluran yang ditindaklanjuti	12 laporan	20.000.000	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	20.000.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	PROGRAM PENGEMBANG AN EKSPOR		Persentase peningkatan ekspor pelaku usaha yang terfasilitasi	100 Persen	622.982.400	PROGRAM PENGEMBANG AN EKSPOR		Persentase peningkatan ekspor pelaku usaha yang terfasilitasi	100 Persen	647.982.400	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang Luar daerah/ luar propinsi	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi dan misi dagang	148 pelaku usaha	622.982.400	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang Luar daerah/ luar propinsi	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi dan misi dagang	148 pelaku usaha	647.982.400	
	Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	6 Pelaku Usaha	150.000.000	Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	6 Pelaku Usaha	150.000.000	
	Pameran Dagang Lokal		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	140 Pelaku Usaha	450.000.000	Pameran Dagang Lokal		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	140 Pelaku Usaha	475.000.000	
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	22.982.400	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	22.982.400	
6.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sesuai standar	97,77 Persen	120.000.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sesuai standar	97,77 Persen	120.000.000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Tingkat kepuasan pengguna layanan kemetrologian	77 Persen	120.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Tingkat kepuasan pengguna layanan kemetrologian	77 Persen	120.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4.000 Unit	75.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4.000 Unit	75.000.000	
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	12 Orang	45.000.000	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	12 Orang	45.000.000	
7.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi	4,50 Persen	185.000.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi	4,50 Persen	185.000.000	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi perdagangan	50 UMKM	185.000.000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi perdagangan	50 UMKM	185.000.000	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	50 UMKM	185.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	50 UMKM	185.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					791.000.000						1.011.000.000
8.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Produktivitas tenaga kerja industri	0,8 Rp/orang	757.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Produktivitas tenaga kerja industri	0,8 Rp/orang	977.000.000	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	umlah monitoring hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kegiatan	4 dokumen	757.000.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	umlah monitoring hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kegiatan	4 dokumen	977.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	30.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	30.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	220.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	527.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	527.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase fasilitas legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah	80 Persen	14.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase fasilitas legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah	80 Persen	14.000.000	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan	1 dokumen	14.000.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan	1 dokumen	14.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	7.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	7.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	7.000.000	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	7.000.000	
10.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase pengawasan industri dalam SIINas	80 Persen	20.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase pengawasan industri dalam SIINas	80 Persen	20.000.000	10
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten	1 dokumen	20.000.000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten	1 dokumen	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	10.000.000	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	10.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	10.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat yang terkait dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Disdagrin. Usulan yang ditelaah merupakan usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun stakeholder. Usulan tersebut terdiri dari usulan yang langsung ditujukan kepada Disdagrin. Usulan dari para pemangku kepentingan tahun 2024, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memenuhi salah satu amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu adanya kegiatan yang didanai dari dana bagi hasil cukai tembakau sesuai kewenangan Disdagrin;
2. Penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan sector industri dan perdagangan perlu mempertimbangkan adanya usulan pokok-pokok pikiran Dewan yang saat ini sedang dalam proses verifikasi;
3. Dalam rangka peningkatan efektifitas pembinaan pelaku usaha sektor perdagangan dan industri, perlu adanya perbaikan data sektor dimaksud melalui kegiatan pendataan dan pembangunan database pelaku usaha sektor industri dan perdagangan;
4. Dalam rangka peningkatan pemasaran produk-produk pelaku usaha (UM/IKM) diperlukan penambahan beberapa kegiatan, yaitu: pembangunan *marketplace* bagi pelaku usaha, penyelenggaraan pelatihan/pembinaan produk lokal dan produk ekspor yang melibatkan pelaku ekspor senior di Kabupaten Jombang sebagai instrukturnya dan peningkatan kecintaan produk Jombang bagi masyarakat Kabupaten Jombang;
5. Pengembangan sektor industri dan perdagangan memerlukan kerjasama lintas sektor, diantaranya dalam penumbuhan wirausaha baru dan peningkatan kemampuan manajemen pelaku usaha sektor industri dan perdagangan.

Dari hasil Forum Organisasi Perangkat Daerah tersebut disusunlah Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana pada [Tabel 2.4 : Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025](#). sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kab. Jombang,	Persentase peningkatan ekspor pelaku usaha yang terfasilitasi	100 Persen	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi dan misi dagang	148 pelaku usaha	
	Pameran Dagang Lokal		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	140 Pelaku Usaha	Festival batik, Festival Kopi, Grebeg tahu
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Jombang,	Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	100 Persen	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dicukupi	16 pasar daerah	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 paket	Rehab atap pasar, PKL (lapak sentra, gapura, toilet), dan sarpras 3 psr
3.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kab. Jombang,	Produktivitas tenaga kerja industri	0,8 Rp/orang	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		umlah monitoring hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kegiatan	4 dokumen	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 paket	Pokir Hibah pada kelompok masyarakat (Pokmas), kelompok usaha bersama (KUB)
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 paket	DBHCHT Magang IKM anyaman pandan

Penyusunan program kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh berbagai stakeholder. Dari berbagai usulan kegiatan tersebut kemudian ditentukan kegiatan-kegiatan prioritas. Penentuan kegiatan-kegiatan prioritas tersebut, dilakukan dengan memperhatikan tema pembangunan daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024, prioritas pembangunan daerah, kebijakan yang bersifat *top down*, sinergitas dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan isu-isu aktual.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

	Strategis	Arah Kebijakan
Kementerian Perdagangan	1) Mengamankan pangsa ekspor dipasar utama	Pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor
	2) Meningkatkan diversifikasi produk ekspor	
	3) Memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif	
	1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Penguatan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok
	2) Meningkatkan koordinasi dan peran pemerintah daerah dalam kelancaran distribusi	
	1) Meningkatkan akurasi data harga barang kebutuhan pokok	Pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok
Kementerian Perindustrian	2) Meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok	
	3) Mengoptimalkan pengelolaan impor barang kebutuhan pokok	
	1) Meningkatkan edukasi konsumen	Peningkatan pemberdayaan konsumen
	2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen	
	1) Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri	Pembinaan dan penanganan pasar dalam negeri
	2) Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas K/L dan daerah dalam mendukung implementasi sistem logistik nasional yang efektif dan efisien	
Kementerian Perindustrian	1) Meningkatkan daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	Pengembangan sumber daya industri
	2) Penguatan implementasi making Indonesia 4.0	
	3) Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri	
	1) Pengembangan standardisasi industri	Pengembangan sarana dan prasarana industri
	2) Pengembangan infrastruktur industri	
	3) Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	

	Strategis	Arah Kebijakan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur	1) Pengembangan industri kecil dan menengah 2) Pengembangan industri hijau 3) Pengembangan industri strategis 4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 5) Kerjasama internasional di bidang industri	Pemberdayaan industri
	1) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) 2) Kawasan Peruntukan Industri (KPI) 3) Kawasan Industri (KI) 4) Pembangunan atau revitalisasi sentra IKM	Pengembangan perwilayahan industri
	<u>Urusan Perindustrian</u>	
	1) Peningkatan produktivitas industri agro	Meningkatkan produktivitas industri agro Jawa Timur
	2) Peningkatan produktivitas industri non-agro	Meningkatkan produktivitas industri non-agro Jawa Timur
	3) Peningkatan kebijakan industri dan perdagangan	Optimalisasi struktur industri dan perdagangan
	4) Peningkatan teknologi industri dan standarisasi	Meningkatkan teknologi industri dan standarisasi di Jawa timur
	<u>Urusan Perdagangan</u>	
	1) Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	Meningkatkan Ekspor dan Pengendalian Impor
	2) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri
Pemerintah Kabupaten Jombang	3) Peningkatan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga	Meningkatkan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga
	4) Peningkatan pelayanan dibidang penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi	Meningkatkan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi Jawa Timur
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang	1) Kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter 2) Penguatan daya saing	Meningkatkan daya dukung infrastruktur berkelanjutan yang mendorong industri agribisnis dan pembangunan wilayah
	<u>Urusan perdagangan</u>	
	1) Peningkatan efektivitas perencanaan dan pelaporan, Peningkatan efektivitas kinerja perangkat daerah.	Meningkatnya efektivitas penyusunan Renstra, Renja dan Lakip; Mengembangkan layanan prima dalam pelayanan publik.

Strategis

- 2) Melakukan operasi pasar;
Pemantauan dan pelaporan harga;
Pengawasan UTTP; Meningkatkan
jumlah pelayanan tera dan tera
ulang.
- 3) Peningkatan sarpras perdagangan;
Melakukan pendataan potensi pasar
dan kemetrolagian.

Urusan perindustrian :

- 1) Peningkatan daya saing;
- 2) Mendorong industri kecil dan
menengah yang memiliki nilai ekspor
dan bernilai tambah tinggi secara
progresif

Arah Kebijakan

Melakukan operasi pasar
sebagai respon atas terjadinya
kenaikan harga/dan atau
sebagai antisipasi potensi
kenaikan harga; Menyusun
database potensi UTTP dan
memperbarui secara berkala;
Peningkatan perlindungan
konsumen, standardisasi UTTP
dan pengamanan perdagangan.

Peningkatan sarana dan
prasarana perdagangan
terutama pasar daerah;
Melakukan e-retribusi pasar.

Peningkatan daya saing
industri melalui peningkatan
kemampuan teknologi industri,
sumberdaya manusia industri,
pengembangan inovasi dan
standardisasi produk industri;
Pengembangan industri kreatif.

Mengembangkan akses
informasi dan pemasaran luar
negeri bagi IKM yang memiliki
nilai ekspor tinggi dan nilai
tambah tinggi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang melalui Mapping Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur pada Matriks Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024-2026 sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Matriks Renstra Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
sesuai Kepmen 900.1.15.5-1317 Tahun 2023**

KETERKAITAN DENGAN RPJMD				MATRIKS RENSTRA HASIL PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR SESUAI KEPMEN 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023					PROGRAM PENDUKUNG			
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET	NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Good Governance (IGG)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	79 (BB)	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%
Meningkatkan daya saing dan Pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan dan Invenstasi Daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi Daerah	Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan	21,12%	2.	Program perijinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase penerbitan rekomendasi perijinan	100%
									3.	Program pengembangan ekspor	Presentase Peningkatan ekspor pelaku usaha yang terfasilitasi	100%
									4.	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Prosentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi	4.52%
									5.	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	100%
									6.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Barang	Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	14.29%
									7.	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat UTTP yang sesuai standar	100%

KETERKAITAN DENGAN RPJMD				MATRIKS RENSTRA HASIL PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR SESUAI KEPMEN 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023					PROGRAM PENDUKUNG			
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET	NO	NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
				Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perdagangan dan Industri Kecil dan Menengah	Produktivitas IKM	Meningkatnya pertumbuhan IKM	Produktivitas tenaga kerja industri	0.8 Rp/Org	8.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Produktivitas tenaga kerja industri	0.8 Rp/Org
									9.	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah	80%
									10.	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase pengawasan industri dalam SIINas	80%

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 sebagaimana tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dalam Urusan Perdagangan yaitu **Meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan** dengan indikator tujuan “Pertumbuhan ekonomi Daerah” dan dalam Urusan Perindustrian yaitu **Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perdagangan dan Industri Kecil dan Menengah** dengan indikator tujuan “Produktivitas IKM.”

Guna mendukung tujuan dan sasaran RPJM periode Tahun 2024-2026 Kabupaten Jombang, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan 10 program yang terdiri atas 1 program rutin dan 9 program non rutin, 26 kegiatan yang terdiri atas (7 kegiatan rutin dan 19 kegiatan non rutin) dan 46 sub kegiatan yang terdiri atas (14 sub kegiatan rutin dan 32 sub kegiatan non rutin) yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Kegiatan pembangunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2025 dilaksanakan Dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang melaksanakan tema pembangunan ke-3 yaitu “**Pembangunan Ekonomi Yang Merata dan Berkelanjutan**” dalam kegiatan strategis daerah yaitu Revitalisasi/Permbangunan Infrastruktur Ekonomi (Revitalisasi/Pembangunan Lanjutan Pasar) dan Penuntasan Penataan *Junction Local Street Food*/Sentra Pedagang Kaki Lima (Penataan Sentra Kuliner bagi PKL).

Perumusan program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang memperhatikan beberapa faktor, diantaranya: kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, dan Renstra OPD. Secara garis besar usulan program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian diusulkan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 19.599.419.919,00 yang bersumber pada APBD dan DBHCHT Kabupaten Jombang. Lokasi sasaran dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah Kabupaten Jombang dan Luar Kabupaten.

Pada tabel T-C.33 disajikan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PERDAGANGAN									
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Kab. Jombang	100 Persen	10.218.926.319	Dana Alokasi Umum		100 Persen	11.378.306.044
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Kab. Jombang	8 dokumen	10.000.000	Dana Alokasi Umum		8 Dokumen	15.391.700
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	3 Dokumen	5.000.000	Dana Alokasi Umum		3 dokumen	7.650.300
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Jombang	5 Laporan	5.000.000	Dana Alokasi Umum		5 dokumen	7.741.400
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Kab. Jombang	12 bulan	7.951.401.859	Dana Alokasi Umum		12 bulan	7.959.280.784
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	56 Orang/ bulan	7.698.798.073	Dana Alokasi Umum		66 Orang/ bulan	7.602.705.234
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang	12 Dokumen	250.000.000	Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	354.384.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang	1 Laporan	2.603.786	Dana Alokasi Umum		1 Laporan	2.191.550

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jombang	4 laporan	2.000.000	Dana Alokasi Umum		4 Laporan	2.240.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jombang	4 Laporan	2.000.000	Dana Alokasi Umum		4 Laporan	2.240.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Jombang	12 bulan	34.800.000	Dana Alokasi Umum		12 bulan	34.200.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Jombang	58 Paket	34.800.000	Dana Alokasi Umum		233 Paket	34.200.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Jombang	12 bulan	580.547.260	Dana Alokasi Umum		12 bulan	703.529.360
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	27 Paket	29.100.300	Dana Alokasi Umum		27 Paket	57.178.200
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	64 Paket	44.224.600	Dana Alokasi Umum		64 Paket	57.178.200
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	5 Paket	161.666.360	Dana Alokasi Umum		5 Paket	216.166.360
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Jombang	17 Paket	200.000.000	Dana Alokasi Umum		17 Paket	219.410.800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Jombang	2 Dokumen	68.556.000	Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	76.556.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	25 Laporan	77.000.000	Dana Alokasi Umum		25 Laporan	77.039.800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan penunjang kantor urusan pemerintah daerah	Kab. Jombang	12 bulan	1.186.567.200	Dana Alokasi Umum		12 bulan	1.199.899.200
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yg Disediakan	Kab. Jombang	12 Laporan	389.400.000	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	401.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	12 Laporan	797.167.200	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	798.499.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik	Kab. Jombang	72 unit	453.610.000	Dana Alokasi Umum		129 unit	1.463.765.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Jombang	1 Unit	38.610.000	Dana Alokasi Umum		1 Unit	38.610.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Jombang	38 Unit	200.000.000	Dana Alokasi Umum		38 Unit	172.375.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Jombang	1 Unit	125.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Unit	1.200.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Jombang	90 Unit	90.000.000	Dana Alokasi Umum		90 Unit	52.780.000
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase penerbitan rekomendasi perijinan	Kab. Jombang	100 persen	100.000.000	Dana Alokasi Umum		100 persen	287.357.500
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah ijin usaha perdagangan yang diterbitkan	Kab. Jombang	6 dokumen	95.000.000	Dana Alokasi Umum		6 dokumen	143.410.000
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Jombang	4 Dokumen	95.000.000	Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	143.410.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	Kab. Jombang	100 Persen	6.543.200.000	Dana Alokasi Umum		100 Persen	15.530.017.745
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dicukupi	Kab. Jombang	16 pasar daerah	6.498.200.000	Dana Alokasi Umum		16pasar daerah	15.287.301.220
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Jombang	18 Unit	4.290.000.000	Dana Alokasi Umum		18 Unit	12.261.216.700
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Jombang	16 Unit	2.208.200.000	Dana Alokasi Umum		16 Unit	3.026.084.520
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Tingkat kepuasan kinerja personalia pengelola pasar daerah terhadap pedagang pasar	Kab. Jombang	77 Persen	45.000.000	Dana Alokasi Umum		77 Persen	242.716.525
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Jombang	12 Dokumen	15.000.000	Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	76.867.562
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Jombang	4 Dokumen	30.000.000	Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	165.848.963
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	Kab. Jombang	14,29 Persen	773.311.200	Dana Alokasi Umum		14,29 Persen	2.100.865.074
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah hasil monitoring ketersediaan bapokting yang ditindaklanjuti	Kab. Jombang	12 laporan	6.926.500	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	16.969.880
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Jombang	12 Laporan	4.158.000	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	5.170.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Jombang	12 Laporan	2.768.500	Dana Alokasi Umum		12 Laporan	11.799.380
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah komoditas bapokting yang terkendali	Kab. Jombang	3 komoditas	746.384.700	Dana Alokasi Umum		3 komoditas	2.057.291.244
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan ekspor pelaku usaha yang terfasilitasi	Kab. Jombang	100 Persen	622.982.400	Dana Alokasi Umum		100 Persen	2.003.997.245
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi dan misi dagang	Kab. Jombang	148 pelaku usaha	622.982.400	Dana Alokasi Umum		410 Pelaku Usaha	2.003.997.245
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Luar Daerah, Luar Propinsi	6 Pelaku Usaha	150.000.000	Dana Alokasi Umum		38 Pelaku Usaha	585.568.000
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kab. Jombang	140 Pelaku Usaha	450.000.000	Dana Alokasi Umum		345 Pelaku Usaha	1.290.000.000
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Luar Daerah, Luar Propinsi	2 Pelaku Usaha	22.982.400	Dana Alokasi Umum		7 Pelaku Usaha	128.429.245
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sesuai standar	Kab. Jombang	97,77 Persen	120.000.000	Dana Alokasi Umum		97,77 Persen	461.875.049
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Tingkat kepuasan pengguna layanan kemetrolagian	Kab. Jombang	77 Persen	120.000.000	Dana Alokasi Umum			461.875.049
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Jombang	4.000 Unit	75.000.000	Dana Alokasi Umum		4000 Unit	311.875.050
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Jombang	12 Orang	45.000.000	Dana Alokasi Umum		12 Orang	149.999.999

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi	Kab. Jombang	4,50 Persen	185.000.000	Dana Alokasi Umum		4,50 Persen	2.303.907.377
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi perdagangan	Kab. Jombang	50 UMKM	185.000.000	Dana Alokasi Umum		50 UMKM	2.303.907.377
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Kab. Jombang	50 UMKM	185.000.000	Dana Alokasi Umum		50 UMKM	2.303.907.377
URUSAN PERINDUSTRIAN									
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Produktivitas tenaga kerja industri	Kab. Jombang	0,8 Rp/orang	757.000.000	Dana Alokasi Umum		0,8 Rp/orang	3.164.103.380
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	umlah monitoring hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kegiatan	Kab. Jombang	4 dokumen	757.000.000	Dana Alokasi Umum		4Dokumen	3.164.103.380
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Jombang	1 Dokumen	30.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	40.958.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Jombang	1 Dokumen	-	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)		1 Dokumen	200.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Jombang	1 Dokumen	527.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.439.200.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Jombang	1 Dokumen	200.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	483.945.380

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Facilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kab. Jombang	1 Dokumen	7.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	7.000.000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah	Kab. Jombang	80 Persen	14.000.000	Dana Alokasi Umum		80 Persen	14.000.000
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan	Kab. Jombang	1 dokumen	14.000.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	14.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kab. Jombang	1 Dokumen	7.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	7.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pengawasan industri dalam SIINas	Kab. Jombang	80 Persen	20.000.000	Dana Alokasi Umum		80 Persen	63.000.000
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten	Kab. Jombang	1 dokumen	20.000.000	Dana Alokasi Umum		1 dokumen	63.000.000
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Jombang	1 Dokumen	10.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	58.000.000
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Jombang	1 Dokumen	10.000.000	Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000
					19.599.419.919				37.307.429.414

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka penyajian program kegiatan dan pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang pada tahun anggaran 2025.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Adapun Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Berikut tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 yang berisi rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana indikator kinerja serta dana indikatif dengan target sasaran sebagai berikut :

Rencana Program dan Kegiatan Dengan Dana Indikatif

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tertuang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana total kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber pendanaannya adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan
1	2	3	4	5	6
SASARAN-1 : MENINGKATNYA OMZET PELAKU USAHA PERDAGANGAN					
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase penerbitan rekomendasi perijinan	100 persen	100.000.000	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan
1	2	3	4	5	6
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah ijin usaha perdagangan yang diterbitkan	6 dokumen	95.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	95.000.000	
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah rekomendasi ijin usaha Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan	4 dokumen	3.000.000	
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	4 Dokumen	3.000.000	
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah rekomendasi ijin usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang diterbitkan	4 dokumen	2.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri		Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	10 Dokumen	2.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	100 Persen	6.543.200.000	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dicukupi	16 pasar daerah	6.498.200.000	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	18 Unit	4.290.000.000	
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	16 Unit	2.208.200.000	
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Tingkat kepuasan kinerja personalia pengelola pasar daerah terhadap pedagang pasar	77 Persen	45.000.000	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan
1	2	3	4	5	6
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	15.000.000	
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen	30.000.000	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	14,29 Persen	773.311.200	
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah hasil monitoring ketersediaan bapokting yang ditindaklanjuti	12 laporan	6.926.500	
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	4.158.000	
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 Laporan	2.768.500	
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota		Jumlah komoditas bapokting yang terkendali	3 komoditas	746.384.700	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	13 Laporan	31.384.700	
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	8 Laporan	715.000.000	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan
1	2	3	4	5	6
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil evaluasi pengawasan, penyaluran yang ditindaklanjuti	12 laporan	20.000.000	
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	20.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase peningkatan ekspor pelaku usaha yang terfasilitasi	100 Persen	647.982.400	
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Jombang Luar daerah/ luar propinsi	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi dan misi dagang	148 pelaku usaha	647.982.400	
Pameran Dagang Nasional		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	6 Pelaku Usaha	150.000.000	
Pameran Dagang Lokal		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	140 Pelaku Usaha	475.000.000	
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	22.982.400	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sesuai standar	97,77 Persen	120.000.000	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Tingkat kepuasan pengguna layanan kemetrologian	77 Persen	120.000.000	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4.000 Unit	75.000.000	
Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	12 Orang	45.000.000	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi	4,50 Persen	185.000.000	
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi perdagangan	50 UMKM	185.000.000	
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	50 UMKM	185.000.000	
SASARAN-2 : MENINGKATNYA PERTUMBUHAN IKM					
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Produktivitas tenaga kerja industri	0,8 Rp/orang	977.000.000	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	umlah monitoring hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kegiatan	4 dokumen	977.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	30.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	220.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	527.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	200.000.000	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah	80 Persen	14.000.000	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan	1 dokumen	14.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	7.000.000	
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	7.000.000	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase pengawasan industri dalam SIINas	80 Persen	20.000.000	
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten	1 dokumen	20.000.000	
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	10.000.000	
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	10.000.000	
SASARAN-3 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN KINERJA PERANGKAT DAERAH					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 Persen	10.218.926.319	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	8 dokumen	10.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5.000.000	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan
1	2	3	4	5	6
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 bulan	7.951.401.859	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ bulan	7.698.798.073	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	250.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.603.786	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	2.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	34.800.000	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	58 Paket	34.800.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	580.547.260	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	27 Paket	29.100.300	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	64 Paket	44.224.600	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	161.666.360	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan
1	2	3	4	5	6
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	200.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	68.556.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	77.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah pemenuhan penunjang kantor urusan pemerintah daerah	12 bulan	1.186.567.200	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	389.400.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Jombang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	797.167.200	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik	72 unit	453.610.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.610.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	200.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	125.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	90 Unit	90.000.000	

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) total anggaran indikatif sebesar Rp. 19.602.419.919,00. (*Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Dua Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah*) dalam rangka akuntabilitas proses perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya diproses menggunakan Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang tertuang dalam sistem aplikasi SIPD (Sistem Informasi Perencanaan) Kabupaten Jombang.

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Pengarustamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Dalam rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang telah menyusun dan menganggarkan program dan kegiatan yang berbasis Gender dengan harapan penyusunan Pengarustamaan Gender (PUG) melalui perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas (baik laki-laki maupun perempuan).

Gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggungjawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan.

Pengarustamaan gender adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Dikatakan terjadi kesenjangan gender apabila salah satu jenis kelamin berada dalam keadaan gertinggal dibandingkan jenis kelamin lainnya (laki-laki lebih banyak dari perempuan atau sebaliknya).

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpatisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Adapun indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut :

1. AKSES; peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu.

2. PARTISIPASI; merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
3. KONTROL; penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.
4. MANFAAT; kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil organisasi memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sudah melaksanakan rencana program dan kegiatan dalam pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG). Sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 dijelaskan bahwa : (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, (2) Penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan berspektif gender dilakukan melalui analisis gender. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 disebutkan bahwa hasil analisis gender dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) dan selanjutnya hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dalam menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

Dalam rencana kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah menyusun dan menganggarkan program dan kegiatan yang berbasis Gender melalui aktivitas survey lapangan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Kampung jujagan, festival batik, festival kopi, grebeg tahu, serta pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Penyediaan sarana distribusi perdagangan (rehab pasar, PKL (lapak sentra, gapura, toilet), serta penyediaan sarana prasarana pasar. Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus, pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi. Pelayanan tera/tera ulang, pengawasan/penyuluhan metrologi legal. Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri, Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base. Hibah pada kelompok masyarakat (Pokmas), kelompok usaha bersama (KUB), serta Magang IKM anyaman pandan.

Adapun besaran kebutuhan anggaran sebanyak Rp. 9.378.493.000,00. berdasarkan aktivitas kegiatan yang dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas (gender baik laki-laki maupun perempuan).

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang sebagaimana pasal 342 ayat (4), Perubahan tersebut juga dalam rangka penyesuaian tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, maka dalam Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan upaya dalam rangka mendukung program pembangunan daerah, pembangunan Propinsi serta pembangunan Nasional, guna mengukur pencapaian sasaran kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas sangat tergantung pada komitmen dari kepemimpinan, konsistensi dan kebijakan serta peran aktif seluruh civitas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang.

Pelayanan di sektor perdagangan diupayakan melalui rekomendasi ijin pelaku usaha, pembinaan promosi dan pemasaran, peningkatan ekspor perdagangan kegiatan promosi melalui pameran produk, yaitu memfasilitasi para pelaku usaha dalam memasarkan produk mereka sebagaimana indikator Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan. Pembangunan pusat kuliner (PKL), Pengelolaan pasar daerah, pendapatan selalu diupayakan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan, karena hal ini berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan memperkuat posisi keuangan daerah, dan sudah dilakukan terobosan baru dengan menerapkan aplikasi e-retribusi yang bekerjasama dengan Perbankan. Kemetriologian difokuskan pada pelayanan tera dan tera ulang (UTTP), pengawasan dan pengendalian peredaran barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), serta alat kemetriologian yang terkalibrasi guna mendapatkan alat UTTP yang sesuai standar.

Pelayanan di sektor perindustrian sebagaimana indikator Meningkatnya Pertumbuhan IKM lebih banyak kepada pelatihan, pendampingan dan fasilitasi terhadap IKM dalam pengembangan usaha. Pelatihan yang dilakukan mencakup pelatihan proses produksi, desain dan kemasan, motivasi, manajemen usaha, peningkatan keterampilan, sampai pada peningkatan teknologi. Untuk fasilitasi yang diberikan antara lain fasilitasi kerjasama kemitraan, hak merk/sertifikasi halal, fasilitasi pengembangan teknologi, desain dan kemasan yang berkolaborasi dengan kegiatan perdagangan pada fasilitasi promosi dan pemasaran. Ada beberapa hal terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan ataupun sasaran kinerja dalam Tahun 2025 oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian

dalam kaidah-kaidah pelaksanaan yang perlu mendapatkan perhatian dan rencana tindak lanjut guna kelancaran dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sudah terprogram, diantaranya :

a. Fungsi pelayanan

- Perkembangan perdagangan diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan pokok, bahan penting serta strategis yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat.
- Iklim usaha yang kondusif, informasi yang transparan guna menunjang kelancaran kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri.
- Pasar Daerah merupakan aset Pemerintah Kabupaten Jombang yang harus diberdayakan dan sebagai bisnis jasa maka harus dikelola dengan baik dengan standar pelayanan yang memenuhi kualitas. Sarana prasarana pasar yang belum memadai diupayakan untuk selalu diperbaiki diantaranya melalui pemeliharaan dan rehabilitasi pasar daerah, dalam hal ini ketersediaan anggaran belum sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah Kabupaten Jombang.
- Sentra Kuliner (PKL) dikawasan Ach.Dahlan bertujuan menciptakan pedagang kreatif lapangan yang kondusif wilayah tetap terjaga.
- Kemetrolagian merupakan bidang yang menangani perlindungan konsumen dalam pelayanan tera/tera ulang guna mewujudkan pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur dengan disertai adanya pengawasan pada alat UTTP dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
- Pengembangan IKM secara nyata akan terintegrasi dalam kemajuan teknologi basis produksi dan daya saing industri.
- Pengembangan IKM dan meningkatkan struktur industri mulai dari industri hulu dan hilir.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

- Didalam pengelolaan pasar sangat diperlukan, terlebih pasar dipandang sebagai salah satu unit usaha agribisnis yang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pola atau tata perdagangan dan distribusi barang.
- Diperlukan integrasi dan sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Peningkatan peran sektor perdagangan dan industri.

c. Rencana tindak lanjut

- Guna mencapai pengelolaan pasar daerah dan pasar tertib ukur yang efektif, efisien dan ekonomis harus di dukung oleh beberapa aspek, diantaranya adalah sumber daya manusia, koordinasi lintas sektoral, kualitas pelayanan, kesadaran wajib retribusi pasar dan kemetrolagian dan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai dasar rujukan pencapaian pelayanan.
- Inovasi yang dicanangkan diantaranya Penerapan eRPAS (elektronik retribusi pasar), Simoleg (Sistem informasi kemetrolagian), Saudagar (Sistem Administrasi Daftar Harga).
- Mengimplementasikannya dalam kegiatan pelatihan, pembinaan, rekomendasi ijin dan fasilitasi standardisasi produk IKM sehingga industri kecil menengah mampu berdaya saing.

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN JOMBANG

